

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PerUUan

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

### B. Putusan

Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/Pn Trg

Putusan No. 229/Pid.Sus/2022/Pn Trg

### C. Artikel

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. (n.d.). Pertambangan. Retrieved from <https://bangkatengahkab.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022, July 12).

Pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama. \*Siaran Pers, No.: 259.Pers/04/SJI/2022. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/id/mediacenter/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Rizki, M. J. (2023, January 26). Pertambangan ilegal dominasi kasus hukum sektor tambang 2022. Hukum Online. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertambangan-ilegal-dominasi-kasushukum-sektor-tambang-2022-lt63d229f55b8c9/>

#### D. Buku & Jurnal

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. VI, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bale, I. T., & Setiadi, E. (2022, January). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 724-731).
- Barat, K. T. G. M. B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Dalam.28
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin, T. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 307-316.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin [Law enforcement against mineral mining crimes in forest areas without permits]. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.
- Hariyanti, F. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Javirawati, J. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Akibat Wanprestasi Para Pihak Terkait Jasa Perbaikan Kapal (Studi pada PT Tunas Karya Bahari Indonesia) (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan  
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>  
Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) Vol. 5.  
No. 1 Januari 2021 pISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
- Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 469 Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai

- Victoria Sherly Endrico Putri Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum,  
Universitas Indonesia Email: [Victoria.sherly@ui.ac.id](mailto:Victoria.sherly@ui.ac.id)
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86.
- Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif PerUUan Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 42-60.
- Marennu, S. A. (2019). Analisis kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di Kota Samarinda. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 21-32.
- Tawakal, I., & Setiadi, E. (n.d.). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Bogor dihubungkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 724. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1166>
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2019). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen). *Recidive*, 8(1).
- Pratama, N. W., & Ismunarno. (2016). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin pertambangan rakyat (IPR) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus penambangan ilegal bahan batu akik di Kabupaten Kebumen). *RECIDIVE*, 5
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312-324